

STATEGI MENSTIMULUS EKONOMI KREATIF INDONESIA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

Britany alasen sembiring

Kementrian Keuangan, djpk
e-mail: britany.as@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Received : Januari, 2021
Accepted : Maret ,2021
Publish online : April ,2021

A B S T R A C T

In the past five years, President of Indonesia has intended to improve the Indonesian economy through the creative economy sector. The creative economy is parallel with Micro, Small and Medium Enterprises, where more than 90 percent Indonesian people put their livelihood. Therefore, the positive growth of the creative economy industry in Indonesia will faster stimulate local and national economic growth. Consequently, it is necessary to have the right policies, especially facilitation from the central government to local governments, which directly dealing with the Indonesian civil people. For example, through the Special Allocation Fund which properly encourage the creation of business leverage for MSMEs engaged in the creative economy industry. This study answers how central government transfer funds in the form of Special Allocation Funds can stimulate the creation of this acceleration of creative economic growth, especially in the pandemic era which bases its business on digital marketing. Using the simultaneous panel method of the local budget industrial sector (APBD sector) and central fund transfer (TKDD) for 34 provinces and other indicators such as labors, household consumption, the construction cost index, and investment in the form of PMTB from the 2014-2019 period, this study results in the significance of all these variables on the growth of the creative economic subsector. The output of this study shows that DAK has the most significant effect in increasing the economic growth of the creative economy in 34 provinces. In addition, investment and household consumption are the biggest levers in supporting the high growth of the creative economy. This is in accordance with the economic theory of the potter model and the neoclassical Solow growth model where investment and technology are important factors in the acceleration of economic growth. Given the condition of the Indonesian people, where most of which are MSMEs in the creative economy sector, investment through DAK to finance the technological transfer and research development is very significant. This was also confirmed through further research in this study in a qualitative method which conducted in-depth interviews with one of the Heads of Bakung Kidul Village, Cirebon. In the interview, there were several important inputs for the evaluation of transfer fund policies that support economic productivity in the creative economy sector, especially in the Tourism Village Area which was built 2 years ago. The results of this qualitative study were also enriched by interviews with DAK policy maker from the Directorate General Fiscal Balance, Ministry of Finance and MSME business actors who were also victims of the Covid-19 pandemic

that hampered the Indonesian economy.

Keywords: Creative Economy, DAK, MSMEs, Technology, Investment

ABSTRAK

Prioritas pembangunan Indonesia dalam lima tahun belakang diusung presiden untuk menggerakkan perekonomian Indonesia salah satunya di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini identik dengan Usaha Mikro Kecil Menengah yang lebih dari 90 persen menjadi mata pencarian hidup masyarakat Indonesia. Pertumbuhan positif industri ekonomi kreatif di Indonesia akan menstimulus secara lebih cepat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat terutama fasilitasi pendukung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selaku pemerintah langsung yang berhubungan dengan masyarakat Indonesia. Misalnya melalui Dana Alokasi Khusus yang tersedia untuk dengan tepat mendorong terciptanya daya ungkit bisnis UMKM yang bergerak di industri ekonomi kreatif. Kajian ini menjawab bagaimana cara dana transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus dapat menstimulus terciptanya percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif ini terutama di era pandemik yang membasiskan usahanya pada digital marketing. Menggunakan metode panel simultan APBD persektor industri dan TKDD pusat kepada 34 provinsi dan indikator lainnya seperti tenaga kerja, konsumsi rumah tangga, indeks kemahalan konstruksi, serta investasi dalam bentuk PMTB dari periode 2014-2019, kajian ini menghasilkan signifikansi semua variabel ini terhadap pertumbuhan subsector ekonomi kreatif. Hasil output dari kajian ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh paling signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sector ekonomi kreatif di 34 propinsi. Selain itu, investasi serta konsumsi rumah tangga menjadi pengungkit paling besar dalam mendukung tingginya pertumbuhan ekonomi kreatif. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi model potter dan neoklasik Solow growth model dimana investasi dan teknologi menjadi factor penting terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi. Mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar UMKM di sector ekonomi kreatif, tentunya stimulus teknologi, investasi melalui DAK ini menjadi sangat signifikan. Hal ini juga dikonfirmasi melalui penelitian lanjutan dalam kajian ini secara kualitatif yang melakukan interview mendalam kepada salah satu Kepala Desa Bakung Kidul, Cirebon. Di dalam interview itu, terdapat beberapa masukan yang penting bagi evaluasi kebijakan dana transfer yang mendukung peningkatan produktifitas ekonomi sector ekonomi kreatif khususnya di Kawasan Desa Wisata yang dibangun sejak 2 tahun yang lalu. Hasil kajian kualitatif ini juga diperkaya dengan adanya interview dengan pemangku kebijakan DAK dari DJPK dan pelaku usaha UMKM yang juga menjadi korban adanya pandemik Covid-19 yang menghambat perekonomian Indonesia.

Kata Kunci : Ekonomi Kreatif, DAK, UMKM, Teknologi, Investasi

PENDAHULUAN

Era revolusi Industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif menjadi salah satu isu strategis dalam mengembangkan ekonomi Indonesia terlebih lagi di masa-masa pandemik dengan mengandalkan kemajuan teknologi *Internet of Things* (IoT) dan *Machine Learning* (ML). Pengembangan ekonomi

kreatif lebih banyak didasarkan pada pembangunan ide-ide baru dalam mengembangkan produk sehingga menghasilkan bisnis yang melibatkan banyak orang. Saat ekonomi kreatif berkembang dan dikombinasikan dengan teknologi informasi, disitulah gaya hidup

dan interaksi masyarakat berubah sehingga aktivitas ekonomi meningkat dan bertumbuh. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggali potensi sumber daya ekonomi kreatif serta membuat sektor ini menjadi unggulan baik sekarang maupun di masa mendatang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, salah satunya adalah melalui pengungkit langsung yaitu dana perimbangan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi hambatan (*barrier*) untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di seluruh daerah di Indonesia. Misalnya, DAK nonfisik dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan training teknologi informasi demi mendukung produk bisnis ekonomi kreatif dapat terpasarkan dengan baik. Namun, bagaimana dan seberapa besar Dana Perimbangan khususnya DAK dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif daerah serta apa saja faktor-faktor pengungkit sehingga ekonomi kreatif daerah dapat berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi daerah Indonesia dapat meningkat dan inklusif? Inilah yang akan coba dibuktikan melalui kajian ini sehingga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan pemerintah terutama melalui dana perimbangan.

PERUMUSAN MASALAH

Kajian ini memfokuskan pada beberapa rumusan masalah sehingga muncul beberapa pertanyaan yaitu;

1. Bagaimana ekonomi kreatif Indonesia dapat berkembang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi termasuk Dana Perimbangan?
2. Apakah Dana Perimbangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif?
3. Bagaimana Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah di Indonesia?
4. Apa saja strategi-strategi yang tepat agar Dana Perimbangan khususnya DAK dapat secara efektif meningkatkan potensi ekonomi kreatif di daerah-daerah Indonesia?

HIPOTESIS KAJIAN

1. Ekonomi kreatif Indonesia dapat berkembang dengan baik dan Dana Perimbangan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia
2. Dana Perimbangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia
3. DAK berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah di Indonesia
4. Terdapat strategi-strategi yang efektif dalam mengembangkan DAK sehingga dapat optimal

meningkatkan potensi ekonomi kreatif daerah di Indonesia.

SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN

Penulisan kajian ini dimulai dengan pendahuluan yang menceritakan latar belakang kajian ini dibuat, perumusan masalah serta hipotesis atas permasalahan yang dihadapi dalam kajian ini. Kemudian, terdapat bagian pembahasan ekonomi kreatif di Indonesia serta peran dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan kajian ini menjadi informasi penting dibuatnya analisis mengenai pengaruh Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kajian ini ditutup oleh kesimpulan dan rekomendasi tentang kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia.

Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Pengaruhnya pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

I. Definisi EKonomi Kreatif dan Klasifikasinya

Ekonomi kreatif selalu berhubungan dengan ide dan pengetahuan baru sehingga munculnya sebuah peluang usaha yang memberikan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Ide ini sangat penting sebagai motor utama penggerak ekonomi seperti yang dikemukakan oleh ahli ekonomi Paul Romer (1993) dimana ide merupakan kombinasi sumber daya fisik yang penyusunannya lebih bernilai. Bahkan Ahli ekonomi lainnya, Alvin Toffler (1980) menyatakan gelombang ekonomi kreatif menjadi gelombang keempat era ekonomi yang berorientasi pada ide kreatif setelah gelombang ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan gelombang ekonomi informasi.

Gelombang ekonomi kreatif memiliki beberapa subsektor ekonomi yang berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengklasifikasikan subsektor ekonomi kreatif sebanyak 14 jenis kedalam buku "Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025", antara lain;

1. Periklanan dalam bentuk TV, radio, brosur, sosial media, *market place* untuk memasarkan produk/jasa.
2. Arsitektur termasuk desain interior, desain bangunan untuk kantor, rumah, mall, ruko, dan lainnya.
3. Pasar Barang Seni yaitu berupa pasar yang didalamnya terdapat pameran hasil karya seni seperti kerajinan tangan (*handicraft*), patung, cinderamata, gelas, tas, kipas, dan sebagainya

4. Kerajinan tangan berupa vas bunga, tas, bantal, sepatu, produk-produk yang dihasilkan melalui tangan manusia tanpa bantuan mesin.
5. Kuliner yaitu bisnis penjualan makanan yang tersedia dalam berbagai menu yang bervariasi
6. Design yaitu berupa desain pakaian, desain grafis, logo dan desain lainnya
7. Fesyen yaitu seni menciptakan pakaian dengan berbagai variasi model termasuk baju, celana, aksesoris, sepatu, dan sebagainya
8. Film, video dan fotografi yang menciptakan karya seni berupa cerita dalam bentuk video dan gambar
9. Musik, yaitu produk seni dalam bentuk lagu, alat musik, nyanyian dengan nada dan melodi tertentu.
10. Seni Pertunjukan berupa seni teater panggung atau drama panggung hingga TV atau serial TV
11. Penerbitan dan Percetakan berupa pembuatan buku, majalah, koran, dan sebagainya
12. Layanan komputer dan perangkat lunak termasuk layanan komputer, perangkat lunak (*software*), *web* dan *game design*.
13. Radio dan televisi yang berkaitan dengan penyiaran konten-konten unik dan menarik
14. Riset dan pengembangan termasuk mendapatkan ide-ide kreatif baru dan bermanfaat bagi kegiatan ekonomi

Bahkan menurut OPUS Ekonomi Kreatif (2019), ada 17 subsektor ekonomi dari sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar 1.105 triliun rupiah terhadap PDB Nasional. Tahun 2020 diperkirakan kontribusi ekonomi kreatif mencapai 7,44 persen terhadap PDB Nasional dimana terdapat tiga subsektor yang memiliki peranan paling penting seperti 41% untuk bisnis kuliner, 17% fesyen, dan 14.9% kerajinan tangan. Kontribusi Ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia membuat Indonesia menempati posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam hal perkembangan ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional

II. Peranan Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Ada beberapa alasan mengapa ekonomi kreatif efektif dalam menggenjot perekonomian Indonesia, diantaranya :

1. Indonesia memiliki potensi penduduk dengan usia produktif yang dominan. Bahkan, Badan

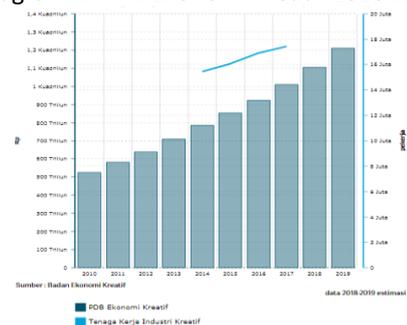
Pusat Statistik menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi dimana pada tahun 2030 diperkirakan penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai 64 persen dengan tingkat ketergantungan usia di Indonesia sebesar 44%. Besarnya penduduk dengan usia produktif ini merupakan potensi untuk mengembangkan kreatifitas dan bisnis baru bagi geliat ekonomi kreatif di Indonesia. **Banyaknya kaum muda (*millennials*) yang berkecimpung di bidang bisnis ekonomi kreatif apalagi sebagian besar didukung dengan teknologi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat.** Berdasarkan data dari Bekraf Indonesia (2018), terdapat 18.1 juta tenaga kerja produktif yang diserap oleh sektor ekonomi kreatif. Tenaga kerja yang diserap ini merupakan 14% dari total angkatan kerja dimana 1 dari 5 tenaga kerja berusia 20-24 tahun.

2. Indonesia memiliki kekayaan dan warisan budaya yang cukup banyak sehingga membuka peluang bagi ekonomi kreatif untuk mengembangkan subsektor bisnisnya
3. Sumber Daya Alam Melimpah di Indonesia sangat mendukung ekonomi kreatif mengembangkan produk baru yang berdaya saing di pasaran
4. Industri kreatif di Indonesia sudah tersebar di wilayah Indonesia walaupun masih terkonsentrasi di pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dsb
5. Bahan baku industri kreatif lebih banyak dari bahan lokal Indonesia yang membuat sumbangan ekspor Indonesia dari industri kreatif Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Peran ekonomi kreatif ini dalam mendukung perekonomian Indonesia telah terbukti pada peningkatan kinerja ekonomi makro diantaranya;

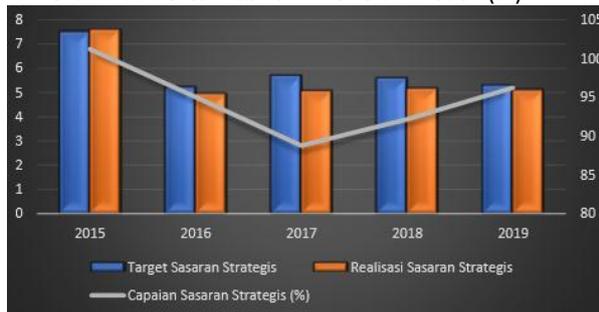
1. Nilai kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto yang kian meningkat dari tahun ke tahun

Diagram 1. PDB Ekonomi Kreatif 2010-2019



Seperti yang dikemukakan sebelumnya ekonomi kreatif memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto Nasional selama 10 tahun terakhir. Hal ini terlihat pada Diagram 1 dimana kontribusi sektor ekonomi kreatif secara linear meningkat dimana rata-rata sumbangsinya mencapai 100 triliun setiap tahun. Kondisi ini juga diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri yang selalu positif walaupun dengan capaian target sekitar lebih dari 95% (Bekraf 2019).

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Kreatif (%)



Lebih lanjut lagi pertumbuhan PDB subsektor televisi, film, animasi menempati tertinggi dari tahun 2016-2018 yaitu rata-rata 10.2%. Bahkan, di era pandemik 2020 ini, sektor ekonomi kreatif di bidang game (industri gim) malah meningkat 10-20%.

2. Share penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2011-2018.

Grafik 2. Grafik Perkembangan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif
[Sumber : Badan Ekonomi Kreatif 2020]



Pada tahun 2018, *share* tenaga kerja terbesar ada pada subsektor kuliner (8.31 juta), fesyen (4.69 juta), dan kriya (3.91 juta). Melalui program-program badan ekonomi kreatif, terdapat peningkatan nilai tambah atau efisiensi produktifitas serta percepatan

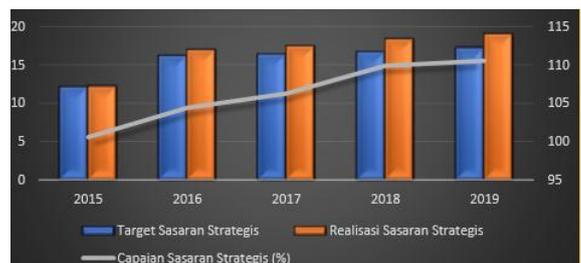
peningkatan keahlian tenaga kerja yang menggeluti subsektor-subsektor terkait.

Berikut adalah persebaran distribusi tenaga kerja berdasarkan subsektor-subsektor terkait:

Tabel I. Sebaran Tenaga Kerja Pada Subsektor Ekonomi Kreatif

Subsektor	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arsitektur	52,210	53,844	57,852	69,374
Desain Interior, Komunikasi Visual, Produk	22,483	23,967	25,618	28,373
Film, Animasi dan Video	37,359	39,546	42,515	51,993
Fotografi	67,351	69,826	74,665	87,443
Kriya	3,640,198	3,717,479	3,910,802	3,913,314
Kuliner	7,410,733	7,983,259	8,350,038	8,308,330
Musik	54,235	56,891	61,514	73,671
Fesyen	3,855,457	4,129,344	4,268,972	4,694,297
Aplikasi dan Game Developer	39,304	41,065	43,435	49,687
Penerbitan	461,274	464,579	490,632	526,234
Periklanan	39,041	40,990	43,928	48,370
Televisi dan Radio	69,741	71,294	77,942	96,334
Seni Pertunjukan	169,884	170,994	182,647	211,114
Seni Rupa	40,320	46,612	49,623	47,755
Total	15,959,590	16,909,690	17,680,182	18,206,309

Grafik 3. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif (Juta Orang)
[Sumber : Badan Ekonomi Kreatif 2020]



Terdapat pola peningkatan tenaga kerja di setiap subsektor ekonomi kreatif. Peningkatan yang stabil ini memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang cukup lebar di semua level usia, pendidikan, dan ekonomi. Terlihat pula di grafik 2, penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terus meningkat setiap tahunnya melebihi target yang ditetapkan Badan Ekonomi Kreatif setiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai melihat sektor ekonomi kreatif menjadi mata pencarian yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan.

3. Nilai ekspor ekonomi kreatif semakin meningkat karena banyaknya permintaan

Meningkatnya pertumbuhan PDB dari ekonomi kreatif ini juga disebabkan adanya peningkatan nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Tahun 2015 nilai ekspor sektor

ekonomi kreatif adalah sebesar US\$19.3 miliar meningkat menjadi US\$22.6 miliar dalam 3 tahun. Nilai ekspor ini terus naik dengan pertumbuhan diatas 3% per tahunnya. Bahkan di tahun 2020, merujuk data BPS (2020), nilai ekspor subsektor fesyen mencapai US\$ 11.9 miliar, kriya US\$ 6.4 miliar, dan kuliner sebesar US\$ 1.3 miliar.

Industri ekonomi kreatif membutuhkan ekosistem yang kondusif sehingga produk ekonomi kreatif dapat berkembang dengan baik dan menjadi unggulan di taraf nasional dan internasional. Pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting berkembang pesatnya sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Menurut Menparekraf, Wishnutama Kusubandio (2020), perbandingan jumlah produk ekonomi kreatif lokal masih timpang dibandingkan dengan barang impor. Dalam layanan marketplace, barang ekonomi kreatif mengisi tidak lebih dari sepuluh persen. Kondisi ini memprihatinkan karena tingkat pertumbuhan ekonomi digital 2019 di Indonesia mencapai 49% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Riset yang dilakukan Google, Temasek, dan Bain Company (2020) menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia berpotensi mencapai transaksi 1.820 triliun rupiah pada tahun 2025. Pertumbuhan transaksi ekonomi digital ini bersumber pada sektor *e-commerce*, daring (*online*), transportasi *online*, wisata perjalanan *online*, dan jasa keuangan digital *online*. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memfasilitasi perkembangan usaha ekonomi kreatif yang berbasis teknologi informasi sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif menjadi lebih baik. Selain itu, dukungan pengembangan pemanfaatan teknologi serta peningkatan produktifitas berkreasi produk ekonomi kreatif yang bernuansa baru dan unggul di pasaran menjadi prioritas yang harus dicapai oleh semua pelaku sektor ekonomi maupun pemerintah baik pusat maupun daerah.

III. Kontribusi dan Program TKDD Khususnya DAK Dalam Menunjang Ekonomi Kreatif di Indonesia di Era Globalisasi

Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian dari Belanja Negara yang diperuntukkan pada pengelolaan desentralisasi fiskal. TKDD ini terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan, serta Dana Desa. Dana Perimbangan sendiri merupakan gabungan dari beberapa Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Masing-masing dari dana ini memiliki formula dan sifat masing-masing. Tujuan dari DAU adalah sebagai alat pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sifat DAU sebagai *block grant* diartikan bahwa penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai program dan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK menurut jenis peruntukannya ada dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan khusus untuk membantu kegiatan khusus fisik urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Sementara itu, DAK Non Fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus bersifat operasional dalam rangka meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Dana Bagi Hasil merupakan dana dengan persentase tertentu yang digunakan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Keseluruhan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai pembangunan daerah dengan menasar pada para pelaku ekonomi penggerak ekonomi daerah.

Dalam mendukung secara spesifik sektor ekonomi kreatif di daerah, dana yang paling cocok digunakan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik. Sektor ekonomi kreatif yang didukung oleh DAK Fisik dan Non Fisik adalah yang ada keterkaitannya dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

1. Dana Alokasi Non Fisik

DAK Non Fisik yang ditujukan untuk sektor ekonomi kreatif adalah Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM) yang diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas SDM koperasi, usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan. Peserta yang telah dididik adalah sebanyak 23.500 peserta di tahun 2016, 23.615 peserta di tahun 2017, 23.545 peserta di tahun 2018, dan 56.056 peserta di tahun 2019. Sementara itu, terdapat 1.500 pendamping dari tahun 2016-2018 dan 1.279 pendamping di tahun 2019. Pada Tahun 2020, capaian DAK Non Fisik PK2UKM adalah sebanyak 15.984 peserta pelatihan dan 579 pendamping.

Pada Tahun 2021, Kebijakan DAK Non Fisik lebih berupa pelatihan dan pendampingan virtual, dengan detail sebagai berikut :

- A. Pelatihan (daring atau luring)
 - 1) Persiapan dan penyelenggaraan pelatihan termasuk akomodasi dan konsumsi pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Biaya paket data internet, biaya visualisasi materi, jasa aplikasi elektronik.
 - 3) Biaya penunjang yang meliputi bahan praktek, alat tulis kantor, honorarium pengelola keuangan, modul atau bahan ajar, spanduk, dokumentasi, publikasi, fotokopi dan penggandaan, trainingkit serta sertifikat.
 - 4) Uang saku harian dan biaya transportasi peserta pelatihan.
 - 5) Honorarium dan biaya perjalanan widyaiswara, fasilitator, instruktur atau pengajar.
 - 6) Jenis pelathannya antara lain, perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, manajerial, kompetensi standar kerja nasional Indonesia.
 - 7) Teknologi informasi yaitu *e-commerce* dan *start-up digital*.
- B. Pendampingan
 - 1) Biaya rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping, honorarium dan koordinator tenaga pendamping.
 - 2) Biaya transportasi dan/atau operasional pendampingan, dan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan, monev DAK Nonfisik PK2UKM.

Selain itu, kebijakan DAK Nonfisik lainnya dalam rangka membangun sektor ekonomi kreatif adalah dalam pelayanan kepariwisataan yang mulai dilakukan dari tahun 2019. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas destinasi dan daya saing pariwisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Terdapat 60.720 peserta pelatihan di tahun 2019, dan 15.984 peserta pelatihan dan operasional Tourist Information Center (TIC) sebanyak 34 di tahun 2020. Rencana di tahun 2021 ada sebanyak 44.320 peserta pelatihan dengan 50 TIC. Jenis kegiatan yang disasar adalah peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas kebersihan, keamanan, dan

keselamatan di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan dukungan operasional non rutin fasilitas pariwisata untuk TIC.

2. **DAK Fisik** yang digunakan untuk fasilitas penunjang sektor ekonomi kreatif antara lain yang berhubungan dengan industri kecil dan menengah, pasar, dan pariwisata. Program sekaligus sasaran DAK Fisik TA 2020 adalah revitalisasi pasar rakyat tipe C dan tipe D, pengembangan kemampuan pelayanan Tera/Tera Ulung Metrologi Legal, serta peralatan uji mutu barang dan sarana pendukung unit metrologi legal. Selain itu, pembangunan dan revitalisasi sentra IKM juga diharapkan dapat mendukung jalannya aktivitas ekonomi kreatif. Ditambah lagi, ada pembangunan amenitas kawasan pariwisata serta pembangunan daya Tarik wisata menjadi program terbaik dalam menggerakkan perekonomian sektor ekonomi kreatif.

METODOLOGI KAJIAN

1. Data Sampel Kajian

Dalam kajian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, SIKD DJPK, dan Badan Ekonomi Kreatif. Data sampelnya berupa dana transfer 34 provinsi di Indonesia yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu terdapat PDRB subsektor ekonomi kreatif yang didapat dari persentase industri pengolahan per provinsi sebagai representatif dari sektor ekonomi kreatif yang sebagian besar di industri pengolahan sebagai variabel dependennya. Sifat data kajian ini adalah data panel 34 provinsi yang memiliki 6 periode dari tahun 2014-2019.

Selain itu, untuk melengkapi informasi yang bersifat kualitatif berupa kebijakan dan model bisnis serta outcome pelaku sektor ekonomi kreatif, kajian ini dilengkapi dengan hasil wawancara pada 3 pihak, yaitu pemerintah pusat, dalam hal ini DJPK yang mengatur kebijakan DAK untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif, pelaku usaha ekonomi kreatif serta pemerintah daerah, dalam hal ini kepala desa yang memiliki usaha ekonomi kreatif.

2. Model dan Metode Kajian

Metode kajian ini bersifat kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif melalui regresi simultan data panel yang terdiri dari beberapa tahapan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh DAK yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan pdrb sektor ekonomi kreatif. Ada 3 tahap model simultan untuk mengetahui pengaruh DAK dan faktor-faktor lainnya terhadap pertumbuhan PDRB subsektor ekonomi kreatif, diantaranya;

1. Tahapan I : Pengaruh perubahan Dana Transfer termasuk DAK dan PAD terhadap perubahan Belanja Modal pemerintah provinsi.

$$Lbmodal = a + bDAK + cDAU + dDBH + ePAD + e$$

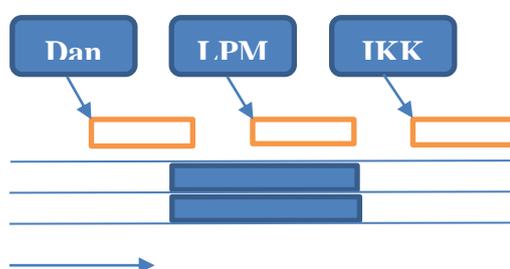
2. Tahapan II : Pengaruh perubahan Belanja Modal, perubahan investasi (PMTB), dan perubahan konsumsi rumah tangga terhadap perubahan PDRB atas dasar harga konstan.

$$LPDRBADHK = f + gLBMODAL + hLPMTB + iLKRT + e$$

3. Tahapan III : Pengaruh perubahan PDRB atas dasar harga konstan (PDRBADHK), Inflasi yang didapatkan dengan perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan perubahan tenaga kerja (LTK) terhadap perubahan PDRB subsektor ekonomi kreatif di setiap provinsi di Indonesia.

$$LEKRAF = j + kLPDRBADHK + lLTK + mIKK + e$$

Diagram 2. Konsep Alur Tahapan Model Simultan Ekraf



Demi menghilangkan variasi perubahan yang terjadi antara tahun juga perbedaan karakteristik setiap provinsi, maka model kajian ini menggunakan *dummy* tahun dan *dummy* kawasan kawasan timur Indonesia dan kawasan barat

Indonesia. Kawasan timur Indonesia meliputi provinsi di pulau sulawesi, pulau nusa tenggara termasuk Bali, Pulau Maluku, dan Papua. Sedangkan kawasan barat Indonesia Meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Kalimantan.

Selain itu, pada tahap melengkapi informasi berupa capaian, kendala, serta kebijakan yang cocok dilakukan melalui DAK kajian ini melakukan wawancara virtual kepada tiga pihak yang berkepentingan yaitu, pemerintah pusat (DJPK yang menangani DAK), pelaku usaha ekonomi kreatif, dan kepala desa selaku pemerintah daerah yang memiliki sentra industri ekonomi kreatif di desanya. Diharapkan dengan kombinasi teknik di kajian ini, tujuan kajian ini berupa peranan DAK beserta strategi yang cocok dalam peningkatan perkembangan ekonomi kreatif dapat terjawab.

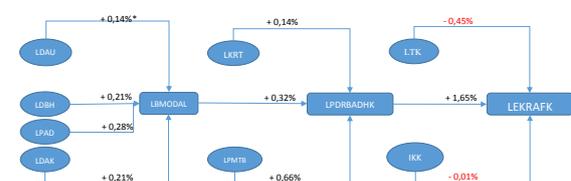
Analisis Peran Faktor-Faktor Dana Transfer dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Indonesia

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Seperti teori pertumbuhan ekonomi yang selalu dikemukakan oleh Solow, seorang ekonom terdahulu menggunakan model fungsi produktif Cobb-Douglas dimana terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya faktor input berupa modal dan tenaga kerja serta faktor teknologi sebagai faktor eksogen.

Dalam hasil ekonometri atas model simultan yang dianalisis di kajian ini, terdapat faktor-faktor yang sama dijelaskan oleh Solow tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi subsektor ekonomi kreatif, yaitu modal, tenaga kerja juga inflasi. Kemudian ada faktor-faktor lainnya yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi (PMTB), juga dana transfer dari pusat kepada daerah. Semua variabel ini mempengaruhi dalam besaran yang berbeda-beda. Dibawah ini adalah diagram yang merepresentasikan signifikansi dan besaran pengaruh setiap variabel terhadap pertumbuhan PDRB subsektor ekonomi kreatif.

Diagram 2. Signifikansi dan Besaran Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Kreatif



Kawasan KTI untuk belanja modal peningkatannya lebih rendah sebesar 0.18%, PDRB lebih besar sebesar 0.15%, dan sektor ekonomi kreatif tumbuh lebih tinggi sebesar 0.46% daripada KBI. Untuk tahun 2019 dari hasil ekonometrika, pencapaian targetnya melebihi rata-rata tren peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif di 6 tahun terakhir.

Dapat terlihat juga di Diagram 2 bahwa pengaruh DAK paling besar dalam meningkatkan belanja modal yang nantinya akan meningkatkan PDRB. Walaupun begitu, investasi dalam hal ini PMTB merupakan stimulan terbesar meningkatkan pertumbuhan pdrb yang pada akhirnya meningkatkan secara lebih besar kepada pertumbuhan PDRB di subsektor ekonomi kreatif.

Disisi lain, tampak di hasil ekonometrika bahwa, penambahan tenaga kerja justru menurunkan pertumbuhan ekonomi subsektor ekonomi kreatif. Hipotesisnya adalah bahwa penambahan tenaga kerja tersebut lebih banyak terarahkan untuk sektor non-ekonomi kreatif walaupun secara spesifik terjadi penambahan tenaga kerja sektor kreatif. Penambahan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif kemungkinan lebih kecil dari penambahan tenaga kerja sektor non ekonomi kreatif.

Kemudian, sesuai teori inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi kreatif. Namun, tampak di hasil ekonometrikanya bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akibat inflasi tersebut tidak terlalu besar karena sifat produk ekonomi kreatif ini unik dan bervariasi sehingga konsumen dapat beralih ke produk ekonomi kreatif lainnya tanpa mempengaruhi secara signifikan permintaan produk/jasa tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana DAK sekarang ini data secara efektif mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif di setiap provinsi di Indonesia? Terdapat beberapa hasil wawancara dari beberapa narasumber dari pihak-pihak seperti pemerintah pusat (DJPK yang menangani DAK), pelaku ekonomi kreatif dan kepala desa yang membina ekonomi kreatif di daerahnya.

Bagaimana DAK dapat mendukung pertumbuhan ekonomi subsektor ekonomi kreatif di daerah?

Untuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pelaku kebijakan DAK di DJPK kerap memberikan beberapa pernyataan dimana terdapat beberapa strategi pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

2. Sisi Pihak Pembuat Kebijakan DAK DJPK

Di kalangan pemerintah pusat (DJPK), formula DAK ini memiliki kekhususan sendiri di setiap bidang yang akan dikembangkan termasuk sektor ekonomi kreatif yang mulai tahun 2015 silam. Sebagai pilar utama perekonomian Indonesia, subsektor ekonomi kreatif ini juga dilindungi oleh Undang-Undang No 24 tahun 2019 khususnya tentang ekonomi kreatif. Pemerintah mendukung mulai dari pendanaan hingga pelatihan agar usaha ekonomi kreatif di Indonesia menjadi keunggulan di kancah bukan lagi lokal tetapi internasional. Di dalam Undang-Undang tersebut pembiayaan ekonomi kreatif tersebut bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah melalui lembaga keuangan bank dan non bank. DAK merupakan sumber dana APBN yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pemanfaatan DAK lebih spesifik untuk ekonomi kreatif daerah ini misalnya adalah pada DAK pariwisata, DAK Kebudayaan, atau DAK yang dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan kejuruan khusus ekonomi kreatif.

Pada DAK Kebudayaan, pemerintah menyalurkan dana yang akan dikelola pemda ini sebagai resolusi memajukan usaha melalui budaya daerah-daerah di Indonesia. Tahun pertama DAK Kebudayaan ini, pemerintah menggelontorkan sekitar 400 miliar rupiah se-Indonesia. DAK Kebudayaan ini langsung ditransfer pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud dengan menetapkan arahan umum yaitu NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang akan diikuti oleh setiap pemda dalam menentukan program usaha ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya daerah-daerah masing-masing. Contohnya, bantuan operasional untuk pemeliharaan dan pembuatan taman budaya, museum, dan program ekonomi kreatif lainnya. Di dalam program ini, dapat berkontribusi pula pelaku-pelaku seni rupa, seni tari, ataupun pelaku kerajinan tangan yang unik dan memberikan pemasukan yang tidak sedikit pada pendapatan asli daerah masing-masing. Penerima DAK Kebudayaan yang dikecualikan adalah pemda DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang memiliki anggaran khusus kebudayaan.

Selain itu, DAK Pariwisata juga dikembangkan dalam mendukung usaha-usaha sektor pariwisata yang didalamnya terdapat usaha-usaha ekonomi kreatif di setiap daerah. DAK pariwisata ini mengikuti skema DAK Fisik Bidang Pariwisata dalam membangun desa wisata termasuk penataan kawasan, aksesibilitas infrastruktur wisata daerah, serta terkait amenitas pariwisata.

Matriks Keterpaduan Penggunaan DAK Sub Bidang Pariwisata Dengan Permasalahan Daya Saing Pariwisata Indonesia

No	Menu DAK Sub Bidang Pariwisata	Kegiatan	Permasalahan Utama Daya Saing Pariwisata
1	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya;	Kesiapan ICT; Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet;	Layanan Infrastruktur Pariwisata; Kesehatan dan Kebersihan;
		Pembuatan pergola dan gazebo;	Layanan Infrastruktur Pariwisata; Keamanan dan Keselamatan;
		Pemasangan lampu taman dan pagar pembatas;	Layanan infrastruktur pariwisata;
		Pembangunan panggung kesenian dan/ pertunjukan;	Layanan infrastruktur pariwisata;
		Pembangunan kios cinderamata;	Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembangunan plaza pusat jajanan kuliner;	Keamanan dan keselamatan Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembangunan tempat ibadah dan menara pandang;	Layanan infrastruktur pariwisata;
		Pembangunan gapura identitas;	Layanan infrastruktur pariwisata;
		Pembuatan jalur pejalan kaki dan rambu-rambu petunjuk arah;	Keamanan dan Keselamatan Layanan Infrastruktur Pariwisata;
2	Peningkatan Amenitas Pariwisata	Pembangunan dermaga wisata;	Kesehatan dan Kebersihan; Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht);	Layanan Infrastruktur Pariwisata
		Pembangunan dive center dan peralatannya;	Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembangunan surfing center dan peralatannya;	Kesiapan ICT; Layanan Infrastruktur Pariwisata;
		Pembangunan talud;	Keamanan dan Keselamatan;
		Pengadaan perahu berlantai kaca;	Keamanan dan Keselamatan;

Sumber: Kemepar, 2018

Contoh pengembangan DAK Pariwisata ini adalah dalam bentuk pemasaran pariwisata, destinasi dan ekonomi kreatif di Gorontalo. Untuk kesepakatan program pengembangan ekonomi kreatif meliputi, penyiapan ruang kreatif di kabupaten/kota, kerjasama kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan SDM di lokasi destinasi, penguatan kelembagaan industri pariwisata, pemanfaatan galery untuk produk ekonomi kreatif di lokasi obyek wisata.

Untuk program DAK Non Fisik, pengembangan subsektor ekonomi kreatif tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan. Selain itu, terdapat peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan, dan keselamatan di destinasi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, dan dukungan operasional non-rutin fasilitas pariwisata untuk TIC.

Kendala yang dihadapi dalam membuat dan mengimplementasikan DAK adalah terjadinya masalah dan kegiatan yang sama dari tahun ke tahun yang perlu dibiayai dan belum ada pemetaan kebutuhan kegiatan yang dibiayai DAK sehingga dapat selesai seperti yang diperkirakan. Selain itu, kebijakan DAK belum memperhatikan pada ketahanan lingkungan yang menjadi fundamental sektor ekonomi kreatif dan sektor lainnya tetap berjalan dan berkelanjutan. Ditambah lagi adanya masalah pada keamanan, kebersihan, keselamatan, layanan infrastruktur, dan kesiapan ICT.

Yang paling penting adalah perlu adanya sinergi antara beberapa kementerian yaitu

kementerian pariwisata, industry, dan kementerian keuangan dalam mendukung setiap langkah ekonomi kreatif di daerah ini dapat berkembang disesuaikan dengan kebutuhannya. Khusus untuk DJPK diperlukan monitoring dan evaluasi secara reguler mengenai implementasi Program DAK setiap tahunnya baik pada level nasional maupun di level pemerintah daerah.

3. Sisi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Salah satu pelaku usaha ekonomi kreatif juga memberikan masukannya mengenai program kebijakan ekonomi kreatif melalui DAK dari pemerintah. Pelaku Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner dan menjadikan usaha ini pencarian utama untuk keluarga. Yang diharapkan dari pemerintah adalah dukungan fasilitasi pengembangan *skill* dari pemerintah daerah khususnya wilayah tempat usahanya berjalan. Dukungan pemerintah ini diharapkan mulai dari sisi aksesibilitas market yang mudah untuk mengembangkan usahanya, ketersediaan dana yang cukup dan mudah dicicil tanpa bunga, serta ketersediaan informasi market mulai dari *demand side* maupun *supply side*.

DAK yang digelontorkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah sebaiknya dirasakan secara nyata oleh pelaku usaha secara massif berdasarkan pemetaan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang valid dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UMKM. Infrastruktur pendukung yang dapat disediakan pemerintah dapat dibangun melalui tempat berjualan yang kondusif, bersih, nyaman, serta bebas dari penyakit, virus dan bahaya. Pungutan-pungutan liar perlu diberantas dengan aparat keamanan daerah sehingga tercipta ekosistem usaha yang lebih baik.

Saat era pandemik tahun 2020, peluang usaha melalui market place dengan sistem digital marketing menjadi *skill* yang sangat dibutuhkan. Saat ini pelaku usaha memerlukan banyak *skill* digital marketing untuk memperluas pemasarannya tidak hanya area tertentu basecamp usaha tempat produksi, tetapi juga seluruh Indonesia bahkan internasional yang memiliki kebutuhan akan produk yang digeluti. Peluang ekspor dan impor serta kemudahan dalam berusaha dan bertransaksi menjadi penting difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya dengan membuat informasi mengakses usaha ekspor impor yang lebih mudah sehingga melalui digital marketing produk pelaku usaha dapat memiliki market yang lebih luas.

Oleh karena itu DAK khusus bidang teknologi yang mendukung sektor ekonomi kreatif diperlukan untuk mendukung pengembangan

serta pertumbuhan ekonomi pada subsektor ekonomi kreatif. DAK, menurut UU ekonomi kreatif dapat digunakan untuk pengembangan riset yang diperlukan dalam membuat atau mengembangkan produk baru berdasarkan kreatifitas manusia. Oleh karena itu, diharapkan program pemerintah melalui DAK dapat memfasilitasi pengembangan riset produk di setiap UMKM ekonomi kreatif sehingga produk yang hadir dapat berkelanjutan dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Sisi Kepala Desa Bakung Kidul, Jamblang, Kota Cirebon

Sebagai level pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, Desa menjadi perpanjangan pemerintah strategis untuk menyalurkan bantuan serta program dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Salah satu contoh yang diwawancarai dalam kajian ini adalah Desa Bakung Kidul, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Desa ini menjadi tempat wisata yang menggabungkan keunikan budaya, seni, adat istiadat, alam, dan bisnis ekonomi kreatif. Desa Wisata yang erat hubungannya dengan kuliner dan kerajinan gerabah ini merupakan satu dari 1.786 desa wisata yang menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, dan Transmigrasi.

Menurut hasil wawancara dari Kepala Desa Bakung Kidul, Bambang Setiawan, Desa Wisata menjadi potensi unggulan jika disinergikan dengan digitalisasi informasi dan teknologi. Apalagi setelah era pandemik tahun 2020 ini, digitalisasi sektor ekonomi kreatif akan dengan cepat bertumbuh jika didukung oleh fasilitasi pemerintah daerah.

Keunggulan ekonomi kreatif yang paling terkenal di Desa Bakung Kidul adalah Sega Jamblang yaitu kuliner khas Kecamatan Jamblang dan kerajinan gerabah celengan Jamblang. Selain itu, produksi tape, jangkrik dan kesenian tradisional juga ikut menghiasi aktivitas perekonomian desa Bakung Kidul.

Menurut Bambang yang kerap dikenal sebagai peternak jangkrik terbesar se-Jawa Barat, desa wisata yang dibangun atas dasar budaya dan kesenian tradisional ini memberikan keunikan tersendiri yang menciptakan peluang produksi bisnis ekonomi kreatif lainnya. Hal ini akan memberikan stimulus positif bagi pengembangan ekonomi daerah baik di dalam maupun luar desa walaupun dalam prosesnya menemui banyak kendala.

Saat ini keberlangsungan desa wisata ini masih terhambat dengan adanya pandemik Covid-19. Padahal ada program untuk mempromosikan ekonomi kreatif Bakung Kidul dengan adanya

paket wisata yang terintegrasi di tingkat kecamatan dimana Desa Bakung Kidul termasuk kedalam paket destinasiya. Jika ada sinergi antara Desa Bakung Kidul dengan desa-desa lainnya di satu kecamatan Jamblang, maka banyak orang dalam dan luar akan mengenal lebih dalam budaya Indonesia sekaligus menjadi peluang memperbesar market bagi ekonomi kreatif masyarakat desanya. Terkait dengan keamanan, diantara desa-desa ini sangat jarang kasus Covid-19 sehingga lebih menguntungkan bagi turis untuk menikmati keindahan seni dan budaya di Indonesia.

Banyak faktor yang dapat dikembangkan untuk dapat mendukung efektifitas jalannya desa wisata di Desa Bakung Kidul khususnya dari sisi pendanaan dan informasi dari pemerintah pusat. Menurut beliau, dana pemerintah seperti Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus apalagi untuk Pariwisata sebaiknya ditransfer langsung ke desa sehingga penyalurannya tidak terlalu lama. Pengalaman beliau, untuk pencairan dana desa saja harus menunggu sampai bulan Juli sehingga untuk mendanai program-program pembangunan beliau harus menggunakan dana pribadinya.

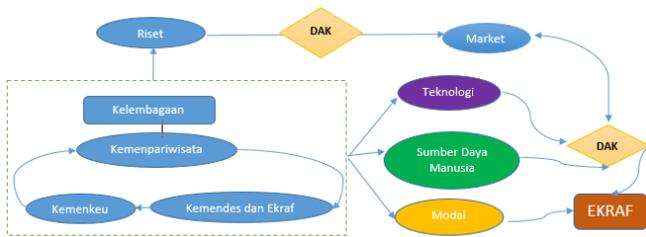
Selain itu, terkait regulasi juga menjadi kendala dibangunnya desa wisata karena rencana induk pembangunan desa wisata hanya ada di level kabupaten Cirebon. Sebaiknya dukungan pemerintah ini juga di level regulasi sehingga pembangunan desa wisata dan pengembangan ekonomi kreatif ini dapat berjalan dengan baik.

Kendala lain yang tak kalah pentingnya adalah minimnya informasi terkait kebijakan, program yang mendukung pembangunan daerah khususnya desa, Misalnya, bantuan dana BLT desa untuk UMKM itu ga ada sosialisasi di tingkat pemerintahan daerah. Informasi refocusing belanja dan bantuan dana tambahan terkait penanganan Covid-19 ini blm disampaikan di level pemerintahan sehingga keaktifan kepala desa menjadi faktor utama jalannya program desa ini. Kemudian, simplifikasi prosedur penyaluran sebaiknya dipermudah sehingga pelaksanaan program menjadi lebih cepat dan efektif dilaksanakan.

Strategi dan Model Pengembangan Bisnis Ekonomi Kreatif

Dari serangkaian metodologi kajian kuantitatif dan kualitatif, maka didapatkan kesimpulan model bisnis melalui DAK seperti Diagram 3 berikut ini;

Diagram 3. Modal Bisnis Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui DAK



Model bisnis ekonomi kreatif memerlukan beberapa faktor fundamental yaitu teknologi, sumber daya manusia, dan modal. Tiga faktor input ini menjadi penggerak ekonomi subsektor ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang sinergi yaitu pada kemenpariwisata, kemenkeu, kemenpperin, dan kemendes akan membuat program yang meningkatkan kualitas teknologi, sdm, serta penguatan modal ekonomi kreatif. Selain itu, terdapat program dari DAK melalui Undang-Undang untuk membiayai riset mengenai pasar serta menjamin supply chain yang dibutuhkan UMKM sektor ekonomi kreatif. Selain itu, riset juga dapat dikembangkan untuk membuat produk yang bernuansa baru berdasarkan kekayaan intelektual dari budaya setiap daerah. Pada akhirnya semua faktor dalam bisnis ini yang dikembangkan melalui mekanisme DAK ini akan mendongkrak jauh sektor ekonomi kreatif hingga menjadi andalan di setiap daerah.

Untuk pengembangan riset pasar, pelaku-pelaku usaha UMKM yang bersektor ekonomi kreatif dapat dikumpulkan dalam bentuk pembangunan sentra IKM. Sentra IKM sendiri merupakan sekelompok IKM yang menghasilkan produk sejenis, bahan baku sejenis, dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama dalam suatu lokasi tertentu. Pembangunan sentra IKM harus memenuhi beberapa prinsip seperti ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya lokal, efisien dan efektif, dan profesional. Dengan prinsip-prinsip ini, sentra IKM ini akan memberikan nilai tambah pada IKM-IKM yang tergabung dan memudahkan dalam pembinaan dalam meningkatkan mutu produktifitas dan daya saing di pasaran.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah memegang peranan penting pada keberlangsungan ekonomi bisnis terutama subsektor ekonomi kreatif. Hal ini dapat dilihat dari hasil kajian kuantitatif melalui ekonometrika bahwa peran serta dana transfer khususnya DAK memberikan pengaruh paling signifikan

terhadap PDRB subsektor ekonomi kreatif. Selain itu, investasi baik dalam maupun luar negeri sangat berpengaruh pula dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi kreatif. Salah satu investasi yang paling relevan saat ini adalah berkembangnya teknologi informasi serta ekonomi digital dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Hal ini juga disampaikan oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif juga kepala desa wisata yang fokusnya adalah desa wisata tempat berkumpulnya ekonomi kreatif masyarakat.

Disisi lain, terdapat beberapa kendala terkait berkembangnya ekonomi kreatif, misalnya adanya proses administrasi yang masih mempersulit izin usaha ekonomi kreatif, belum ada payung hukum dalam membangun sentra ikm pada desa, serta kapasitas SDM yang masih harus bersaing dalam mengembangkan produk/jasa ekonomi kreatif. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan model bisnis ekonomi kreatif yang memasukkan peran DAK dalam mengembangkan bisnis ekonomi kreatif di setiap daerah. Model bisnis ini memasukkan riset pengembangan produk dan supply chain (dalam hal ini pembangunan sentra IKM yang ada dalam petunjuk juknis pengembangan yang dapat dibiayai oleh DAK Fisik). Kemudian didalamnya juga terdapat pengembangan teknologi serta informasi yang juga dibutuhkan oleh para pelaku usaha bisnis ekonomi kreatif. Sinergi antara kementerian yang berhubungan dengan sektor ekonomi kreatif menjadi sangat penting karena program yang akan dijalankan harus sejalan dengan prioritas nasional yang telah menjadi salah satu kontributor terbesar PDB nasional Indonesia.

2. Rekomendasi

Kajian ini memberikan warna bagi peran pemerintah dalam mengembangkan ekonomi daerah melalui Dana Alokasi Khusus. Kajian ini mencoba memberikan masukan bahwa kerjasama antar kementerian dalam mengembangkan ekonomi kreatif sebaiknya perlu dijadikan kajian tersendiri dan diaplikasikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kesamaan informasi antara berbagai pelaku usaha ekonomi kreatif menjadi poin penting suksesnya program pemerintah. Oleh karena itu kerjasama vertikal, yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat ekonomi kreatif sampai ke tingkat desa dalam mensosialisasikan program pengembangan

bisnis DAK sebaiknya perlu dilakukan. Kesamaan informasi terkait program pemerintah dan pemetaan kebutuhan para pelaku usaha akan memberikan nilai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang berkepentingan. Masyarakat yang bermata pencarian sektor ekonomi kreatif ini akan membuka lapangan kerja sendiri sehingga pengangguran akan semakin turun serta kemiskinan juga akan semakin terminimalkan. Poin yang tidak kalah pentingnya adalah pemetaan data para pelaku usaha di setiap daerah sehingga saat ada program pemerintah penyaluran bantuan serta dukungan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah sendiri maupun masyarakatnya untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif berdasarkan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS 2020, "PDRB berdasarkan lapangan usaha", [bps.go.id
https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3](https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3) [diakses 30 november 2020]
- [2] DPR 2020, "Perkembangan dan Arah Kebijakan Khusus Dana Alokasi Khusus 2015", [dpr.go.id
https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-21.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/referensi-apbn/public-file/referensi-apbn-public-21.pdf) [diakses 30 november 2020]
- [3] Hastuti, D. dan Zamzani 2018, "Determinan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 13, No. 1, ISSN :2085-1960 <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/4903/8815> [diakses 30 november 2020]
- [4] Katadata 2020, "Bekraf Targetkan Industri Kreatif Serap 17 Juta Tenaga Kerja pada 2019", katadata.go.id
- [5] Kemendikbud 2020, "DAK Kebudayaan Beri Keleluasaan kepada Pemda dalam Pemajuan Kebudayaan", [kemendikbud.go.id
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/dak-kebudayaan-beri-keleluasaan-kepada-pemda-dalam-pemajuan-kebudayaan](https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/dak-kebudayaan-beri-keleluasaan-kepada-pemda-dalam-pemajuan-kebudayaan) [diakses 30 november 2020]
- [6] Kemenko PMK 2020, "DAK Kebudayaan, Untuk Mendukung Kreativitas Pekerja Seni dan Industri Kreatif", [kemenkopmk.go.id
https://www.kemenkopmk.go.id/dak-kebudayaan-untuk-mendukung-kreativitas-pekerja-seni-dan-industri-kreatif](https://www.kemenkopmk.go.id/dak-kebudayaan-untuk-mendukung-kreativitas-pekerja-seni-dan-industri-kreatif) [diakses 30 november 2020]
- [7] Kemenparekraf 2020, "Data Statistik dan Hasil Survei Ekraf 2016", Badan ekraf Indonesia <https://www.kemenparekraf.go.id/post/d-ata-statistik-hasil-survei-ekraf-2016pdf> [diakses 30 november 2020]
- [8] Lokadata 2020, "PDB Ekonomi Kreatif", [katadata.go.id
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pdb-ekonomi-kreatif-2010-2019-1563263171#](https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pdb-ekonomi-kreatif-2010-2019-1563263171#) [diakses 30 november 2020]
- [9] Riyatin, W. 2019, "Pembangunan Sentra IKM Dalam Rangka Pemberdayaan Industri", Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jawa Timur
- [10] Segupta, J. 2011. *Understanding Economic Growth*. Springer: London <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/45144/1/84.pdf> [diakses 30 november 2020] F. Sukma "Instagram Faradita Sukma". Internet: <https://www.instagram.com/faradiktasukmaa/?hl=id>, 23 Maret, 2021 [23 Maret, 2021]
- [11] M. Sutisna "Instagram Mahesa Sutisna". Internet: <https://www.instagram.com/mahesasutisna/?hl=id>, 23 Maret, 2021 [23 Maret, 2021]